



PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA
CENTRE FOR INDONESIAN ECONOMIC & TOURISM STUDIES

POLICY BRIEF

Menimbang Peluang Indonesia sebagai Pusat Bisnis Baru Asia

Konvergensi Pelemahan Rupiah dan IEU-CEPA
sebagai Momentum Strategis Pengembangan
Industri Wisata Bisnis Nasional

Nomor : 06/PB/PKPEI/V/2026 – 22 Mei 2026

Pusat Kajian Pariwisata & Ekonomi Indonesia
(Centre for Indonesian Economic & Tourism Studies)



PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

Menimbang Peluang Indonesia sebagai Pusat Bisnis Baru Asia

Konvergensi Pelemahan Rupiah dan IEU-CEPA sebagai Momentum Strategis Pengembangan Industri Wisata Bisnis Nasional

POLICY BRIEF | No.06/PB/PKPEI/V/2026

ABSTRAK

Policy brief ini menganalisis konvergensi dua kekuatan ekonomi strategis bagi Indonesia, yakni pelemahan rupiah terhadap dolar AS dan euro pada periode 2025–2026, serta penandatanganan Indonesia–EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) yang akan berlaku efektif Januari 2027. Kajian ini menemukan bahwa pertemuan dua kekuatan tersebut menciptakan jendela peluang struktural berdurasi 12–18 bulan bagi Indonesia untuk mereposisi diri sebagai pusat bisnis baru di Asia. Analisis berbasis data BPS, Bank Indonesia, dan riset pasar global menunjukkan bahwa segmen wisata bisnis (MICE) menjadi sektor dengan potensi monetisasi tercepat. Kegagalan dalam mengonversi momentum ini akan menyebabkan kerugian struktural berupa hilangnya kontrak konferensi internasional jangka panjang ke pesaing kawasan.

ANGKA-ANGKA KUNCI

US\$ 7,4 M Proyeksi pasar MICE Indonesia 2032	3x Pengeluaran wisman Eropa vs ASEAN	5,6% Depresiasi rupiah YTD 2026	12-18 bln Estimasi jendela peluang
---	--	---	--

Ringkasan Eksekutif

Pelemahan rupiah terhadap mata uang asing utama sepanjang 2025–2026 lazim dipersepsikan publik sebagai indikator kerentanan ekonomi nasional. Persepsi ini, meskipun memiliki dasar argumentatif, melewati dimensi peluang yang dibukakan oleh konvergensi antara dinamika nilai tukar dan momentum kebijakan perdagangan internasional. Policy brief ini berargumen bahwa pertemuan antara pelemahan rupiah dengan penandatanganan Indonesia–EU Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) menciptakan jendela peluang strategis yang langka bagi Indonesia untuk mereposisi diri di peta ekonomi kawasan.

Per pertengahan Mei 2026, rupiah berada di kisaran Rp 17.670 per dolar AS dan Rp 20.170 per euro. Bagi pelaku bisnis Eropa, kondisi ini menghasilkan reduksi biaya operasional sekitar 10 hingga 15 persen



PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

dibandingkan dua tahun sebelumnya. Apabila dipadukan dengan eliminasi tarif IEU-CEPA yang akan berlaku Januari 2027, Indonesia berada pada konjungtur ekonomi yang sulit ditandingi pesaing kawasan.

Temuan Utama

- **Paradoks nilai ekonomi wisatawan Eropa.** Wisatawan Eropa menyumbang hanya 16 persen kunjungan, namun memberikan kontribusi devisa sekitar 34 persen total penerimaan pariwisata.
- **Konvergensi advantage harga dan eliminasi tarif.** Pelemahan rupiah memberikan diskon efektif 10-15 persen, dipadukan dengan tarif preferensial IEU-CEPA menciptakan value-for-money proposition yang sulit ditandingi.
- **Gap struktural sektor MICE Indonesia.** Kontribusi industri MICE Indonesia terhadap PDB hanya 0,5 persen, jauh di bawah Singapura (2,0%) dan Hong Kong (1,8%).
- **Jendela peluang sementara.** Bank Indonesia memperkirakan stabilisasi rupiah pada pertengahan 2026, sehingga keunggulan harga ini diperkirakan bertahan 12 hingga 18 bulan.
- **Risiko struktural kelambanan.** Pasar wisata bisnis bergerak dalam siklus penawaran jangka panjang. Kontrak konferensi tahunan yang ditandatangani Singapura, Thailand, atau Vietnam pada periode 2026–2028 akan sulit direbut kembali.

REKOMENDASI UTAMA

PKPEI merekomendasikan pembentukan gugus tugas lintas-kementerian yang menyatukan Kementerian Perdagangan, Pariwisata, Investasi, dan Kamar Dagang Indonesia, dengan mandat khusus mengonversi keunggulan nilai tukar dan IEU-CEPA menjadi pesanan konferensi internasional yang terjadwal dalam periode 2026–2028. Tanpa intervensi terkoordinasi, jendela peluang ini akan tertutup tanpa monetisasi yang berarti.

1. Konteks dan Latar Belakang

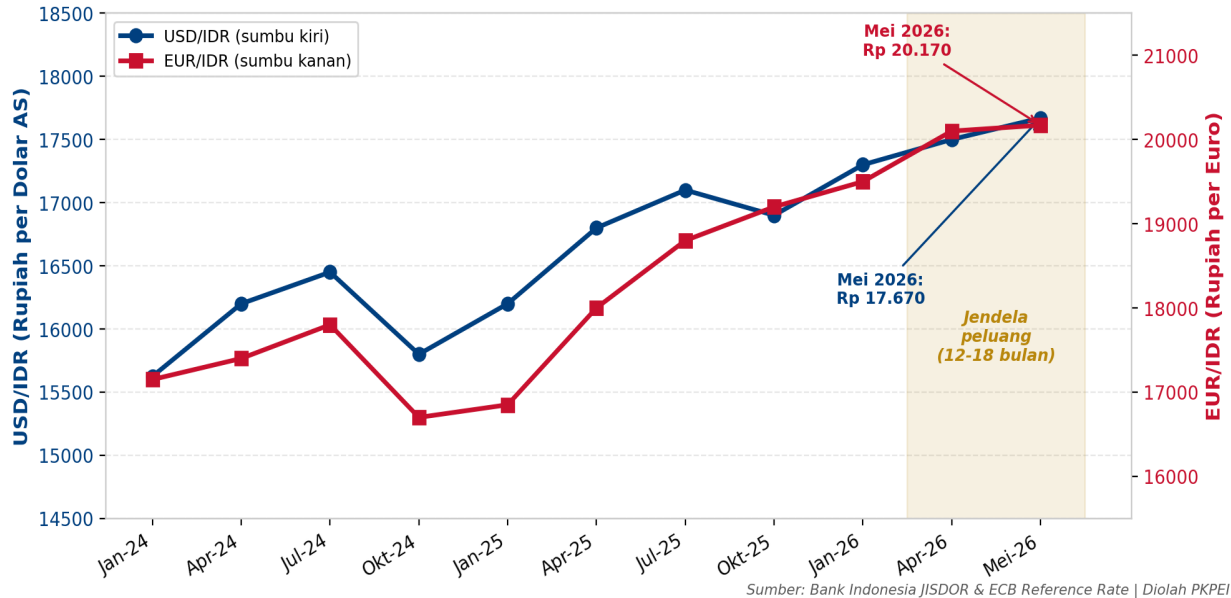
1.1 Pelemahan Rupiah dan Pembungkai Publik

Sepanjang periode Januari 2024 hingga Mei 2026, rupiah mengalami tren depresiasi yang konsisten terhadap dua mata uang acuan global, yakni dolar Amerika Serikat dan euro. Berdasarkan data Bank Indonesia melalui Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), kurs USD/IDR bergerak dari kisaran Rp 15.625 pada Januari 2024 menjadi Rp 17.670 pada pertengahan Mei 2026, atau setara dengan depresiasi kumulatif sekitar 13 persen dalam 29 bulan. Tekanan terhadap euro lebih intens, dengan kurs EUR/IDR menguat dari Rp 17.150 menjadi Rp 20.170, atau apresiasi euro sebesar 17,6 persen pada periode yang sama.



PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

Tren Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS dan Euro, Januari 2024 - Mei 2026 Pelemahan Rupiah Menciptakan Keunggulan Harga Sementara



Gambar 1.1 — Tren nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan euro, Januari 2024 hingga Mei 2026. Area kuning menunjukkan jendela peluang strategis.

Diskursus publik atas pelemahan ini cenderung bersifat alarmist, dengan fokus pada ancaman terhadap stabilitas ekonomi makro, peningkatan beban utang valuta asing, dan tekanan inflasi impor. Pembungkahan ini absah dalam batas-batas tertentu, namun mereduksi kompleksitas dampak nilai tukar pada perekonomian nasional. Literatur ekonomi pembangunan, sebagaimana didemonstrasikan dalam karya klasik Rodrik (2008) tentang real exchange rate undervaluation, menunjukkan bahwa mata uang yang relatif lebih lemah dapat berfungsi sebagai instrumen daya saing yang efektif bagi negara berkembang, terutama dalam sektor-sektor yang berorientasi ekspor jasa.

1.2 IEU-CEPA dan Restrukturisasi Hubungan Ekonomi Bilateral

Penandatanganan Indonesia–EU Comprehensive Economic Partnership Agreement pada 23 September 2025, setelah sepuluh tahun proses negosiasi, menandai babak baru dalam arsitektur ekonomi Indonesia–Uni Eropa. Perjanjian ini akan berlaku efektif pada Januari 2027 dan mencakup eliminasi tarif untuk lebih dari 98 persen lini tarif, pembentukan kerangka perlindungan investasi melalui Investment Court System, serta liberalisasi sektor jasa termasuk perjalanan profesional dan business travel.

Diskursus akademis dan publik atas IEU-CEPA selama ini didominasi oleh analisis sektor barang, khususnya minyak sawit, tekstil dan produk tekstil, serta hilirisasi mineral kritis. Pembahasan tersebut absah secara substantif, namun melewatkan dimensi yang berpotensi memberikan dampak transformatif yang lebih luas, yakni implikasi perjanjian ini terhadap sektor jasa, khususnya industri wisata bisnis atau yang dalam literatur internasional dikenal sebagai MICE — singkatan dari meetings, incentives, conferences, dan exhibitions.

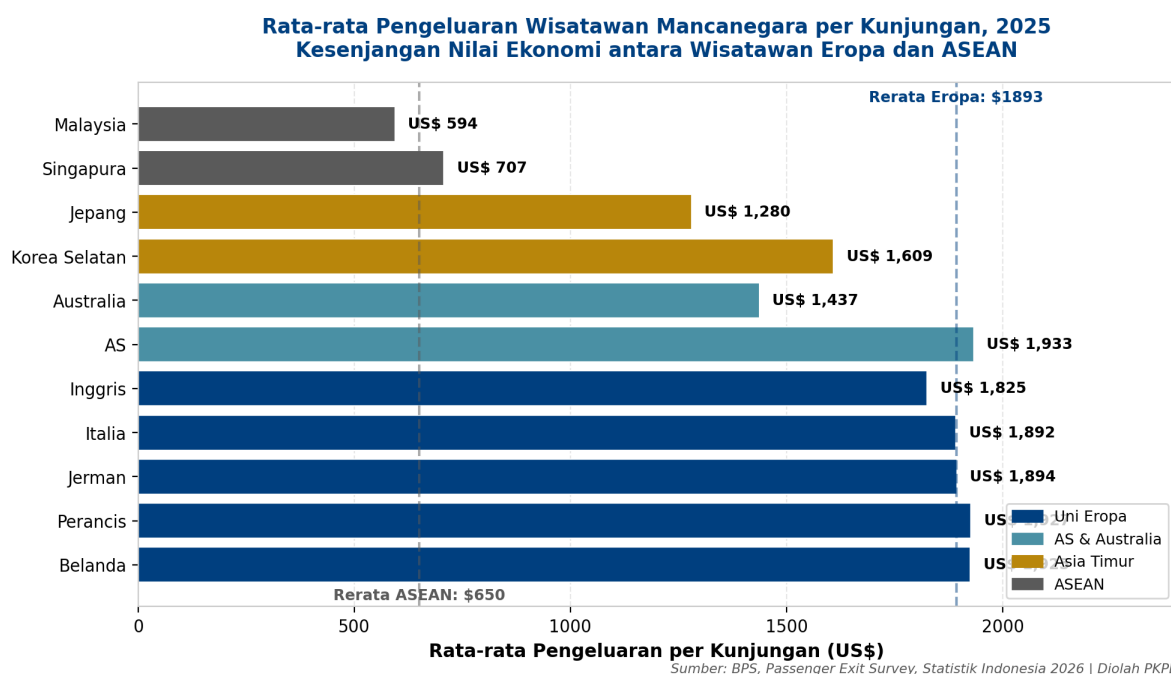


PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

2. Analisis Empiris

2.1 Paradoks Wisatawan Eropa: Kecil dalam Jumlah, Besar dalam Nilai

Data Badan Pusat Statistik tahun 2025 menyajikan paradoks yang patut dicermati dalam konteks ekonomi pariwisata Indonesia. Dari total 15,4 juta kunjungan wisatawan mancanegara, wisatawan asal Uni Eropa hanya menyumbang 2,46 juta kunjungan atau sekitar 16 persen. Angka ini, pada pandangan pertama, tampak tidak menonjol. Namun ketika pengeluaran rata-rata per kunjungan dibandingkan, kontribusi ekonomi wisatawan Eropa terungkap melampaui proporsi kuantitatifnya secara signifikan.



Gambar 2.1 — Rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara per kunjungan tahun 2025. Sumber: BPS Passenger Exit Survey.

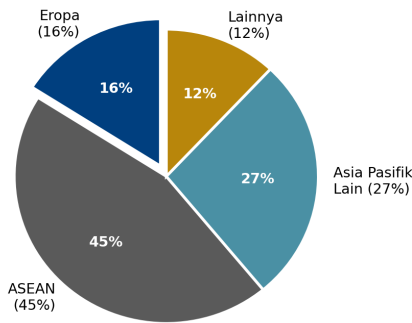
Berdasarkan Passenger Exit Survey yang dilakukan BPS, rata-rata pengeluaran wisatawan Belanda tercatat sebesar US\$ 1.925 per kunjungan, Perancis US\$ 1.927, Jerman US\$ 1.894, dan Italia US\$ 1.892. Angka ini berdiri kontras dengan pengeluaran wisatawan dari kawasan ASEAN, di mana wisatawan Singapura hanya membelanjakan US\$ 707 per kunjungan dan wisatawan Malaysia US\$ 594. Dengan kata lain, satu wisatawan Eropa secara ekonomi setara dengan kontribusi devisa tiga wisatawan ASEAN.



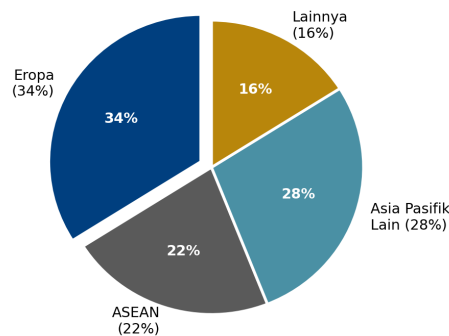
PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

Paradoks Wisatawan Eropa: Kecil dalam Jumlah, Besar dalam Nilai Ekonomi

Komposisi Kunjungan Wisatawan Mancanegara 2025 (Berdasarkan Jumlah)



Estimasi Kontribusi Devisa Pariwisata 2025 (Berdasarkan Pengeluaran x Jumlah)



Sumber: BPS, diolah PKPEI berdasarkan kunjungan & rata-rata pengeluaran

Gambar 2.2 — Paradoks wisatawan Eropa: 16 persen dari jumlah kunjungan, namun menyumbang sekitar 34 persen kontribusi devisa pariwisata.

Selain dimensi pengeluaran, karakteristik wisatawan Eropa juga ideal bagi negara tujuan yang berupaya mereposisi diri pada segmen pariwisata bernilai tambah tinggi. Rata-rata durasi tinggal mereka lebih panjang dibandingkan wisatawan ASEAN, pola konsumsi lebih beragam, serta kecenderungan untuk memadukan perjalanan bisnis dengan rekreasi — fenomena yang dalam literatur disebut sebagai *bleisure travel* — semakin mengukuhkan posisi mereka sebagai segmen prioritas dalam strategi pariwisata berkelanjutan.

2.2 Efek Multiplier Pelemahan Rupiah terhadap Daya Beli Eropa

Dampak ekonomi pelemahan rupiah terhadap daya beli pelaku bisnis Eropa dapat diukur melalui pendekatan komparatif lintas waktu. Pada November 2025, satu euro setara dengan Rp 19.183. Per pertengahan Mei 2026, nilai tukar yang sama telah bergerak ke Rp 20.170, atau apresiasi euro sebesar 5,1 persen dalam tujuh bulan. Jika dibandingkan dengan periode dua tahun sebelumnya ketika kurs EUR/IDR berada di kisaran Rp 17.000, apresiasi kumulatif euro mencapai sekitar 18 persen.

Bagi korporasi Eropa yang menyelenggarakan konferensi, perjalanan insentif (*incentive travel*), atau pelatihan korporasi di Indonesia, apresiasi ini menghasilkan reduksi biaya efektif yang substansial. Dengan asumsi biaya nominal venue dan akomodasi di Indonesia relatif stabil dalam rupiah, biaya yang sama jika dikonversi ke euro menjadi 10 hingga 15 persen lebih murah dibandingkan dua tahun lalu. Indonesia, secara efektif, sedang menawarkan diskon struktural kepada pelaku bisnis dari benua biru tanpa intervensi kebijakan apa pun.

Posisi Komparatif Indonesia dalam Konstelasi Kawasan

Konteks komparatif menjadi krusial untuk memahami signifikansi keunggulan ini. Tabel berikut menyajikan perbandingan posisi kompetitif Indonesia terhadap pesaing utamanya di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur dalam menarik segmen wisata bisnis Eropa.



PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

Tabel 2.1 — Posisi Komparatif Indonesia dalam Konstelasi Wisata Bisnis Asia, 2026

Negara	Tren Mata Uang	Biaya Hidup Global	Kontribusi MICE PDB	Posisi Strategis
Indonesia	Melemah (advantage)	Rasional	0,5%	Underpenetrated
Singapura	Stabil/menguat	3 termahal dunia	2,0%	Saturated
Thailand	Menguat (baht)	Menengah	0,9%	Established
Vietnam	Stabil (managed)	Rendah	0,6%	Emerging
Malaysia	Stabil	Menengah	1,0%	Established

Indonesia menempati posisi yang unik dalam konstelasi ini. Pelemahan rupiah, yang dalam pemingkiaan konvensional dipersepsikan sebagai kelemahan, justru memberikan Indonesia keunggulan harga relatif yang tidak dimiliki Singapura yang biayanya tinggi, Thailand yang bahtnya menguat, atau Vietnam yang nilai tukarnya dikendalikan ketat. Kombinasi rupiah yang lentur dan ekosistem MICE yang berkembang menempatkan Indonesia pada titik temu yang langka antara harga kompetitif dan kelengkapan layanan.

3. Trade-Tourism Nexus: Kerangka Analitis

Untuk memahami bagaimana IEU-CEPA berpotensi mengakselerasi pertumbuhan wisata bisnis Indonesia, perlu didefinisikan terlebih dahulu kerangka analitis yang dalam literatur ekonomi pariwisata dikenal sebagai trade-tourism nexus. Kerangka ini, sebagaimana dikembangkan dalam karya Khan, Toh, dan Chua (2005) serta dielaborasi lebih lanjut oleh Surugiu dan Surugiu (2013), mengidentifikasi keterkaitan kausalitas dua arah antara intensitas perdagangan bilateral dengan frekuensi perjalanan bisnis lintas batas.

3.1 Mekanisme Transmisi

Mekanisme transmisi dari perjanjian dagang ke industri wisata bisnis dapat ditelusuri melalui empat jalur utama. Pertama, eliminasi tarif dan harmonisasi regulasi menurunkan biaya transaksi perdagangan, sehingga meningkatkan frekuensi kontrak ekspor-impor. Setiap kontrak dagang lintas batas membutuhkan rangkaian aktivitas perjalanan profesional, mulai dari pertemuan negosiasi awal, kunjungan due diligence, penandatanganan kontrak, hingga monitoring pelaksanaan. Kedua, peningkatan investasi asing langsung membawa serta ekosistem ekspatriat, rotasi karyawan, dan pertemuan korporasi lintas batas yang berulang. Ketiga, harmonisasi standar dan regulasi melalui CEPA membuka peluang penyelenggaraan konferensi tematik yang relevan dengan substansi perjanjian. Keempat, pembentukan jaringan bisnis bilateral mendorong munculnya pameran dagang dan acara industri yang berkelanjutan.

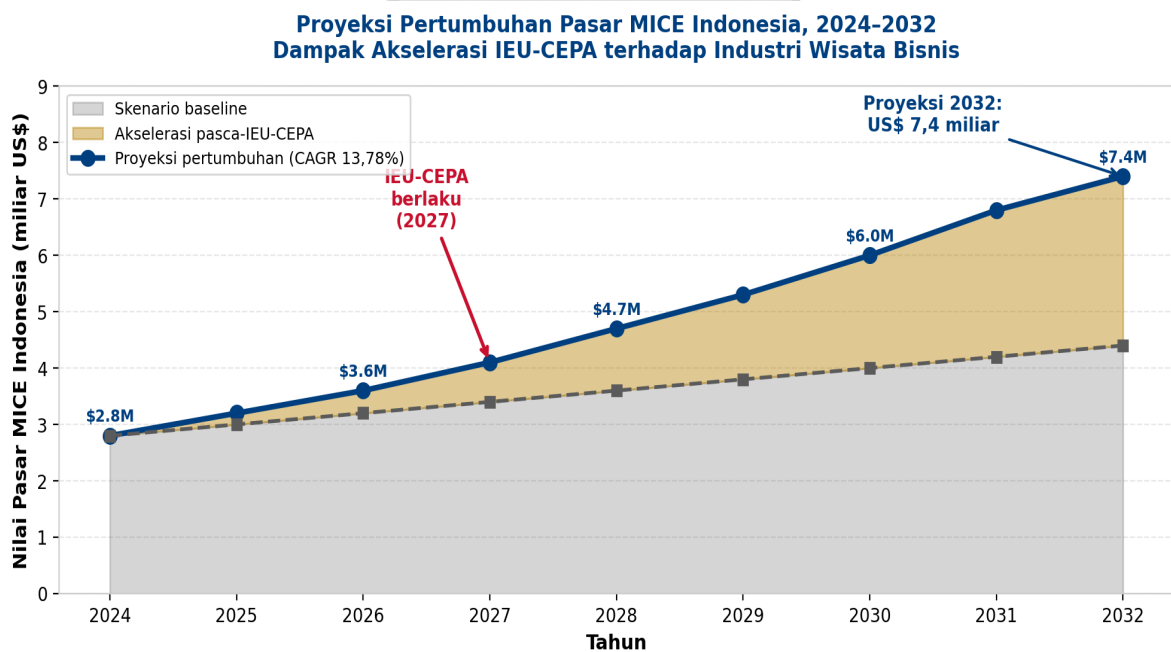


PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

Pengalaman empiris dari implementasi EU-South Korea FTA, EU-Singapore FTA, dan EU-Vietnam FTA mengkonfirmasi efek positif perjanjian dagang terhadap pertumbuhan wisata bisnis. Studi yang dilakukan European Travel Commission (2024) menemukan bahwa kunjungan profesional dari Uni Eropa ke Vietnam meningkat sekitar 43 persen dalam lima tahun pasca-implementasi EVFTA, dengan pertumbuhan paling signifikan terjadi pada kategori meeting attendees dan trade show participants.

3.2 Proyeksi Dampak terhadap Pasar MICE Indonesia

Berdasarkan kerangka trade-tourism nexus dan benchmarking pengalaman negara-negara mitra CEPA Uni Eropa lainnya, dapat disusun proyeksi pertumbuhan pasar MICE Indonesia hingga 2032. Asumsi yang digunakan meliputi compound annual growth rate (CAGR) sebesar 13,78 persen sebagaimana proyeksi industri, akselerasi tambahan 3–5 persen poin pasca-implementasi IEU-CEPA, dan stabilisasi nilai tukar rupiah pada level wajar setelah 2027.



Gambar 3.1 — Proyeksi pertumbuhan pasar MICE Indonesia 2024–2032 dengan skenario akselerasi pasca-IEU-CEPA.

Proyeksi ini menunjukkan bahwa pasar MICE Indonesia berpotensi mencapai US\$ 7,4 miliar pada 2032, atau hampir tiga kali lipat dari nilai pasar saat ini sebesar US\$ 2,8 miliar pada 2024. Pertumbuhan ini didorong terutama oleh peningkatan permintaan dari korporasi multinasional Eropa yang akan memperluas operasi mereka ke Indonesia pasca-implementasi IEU-CEPA.

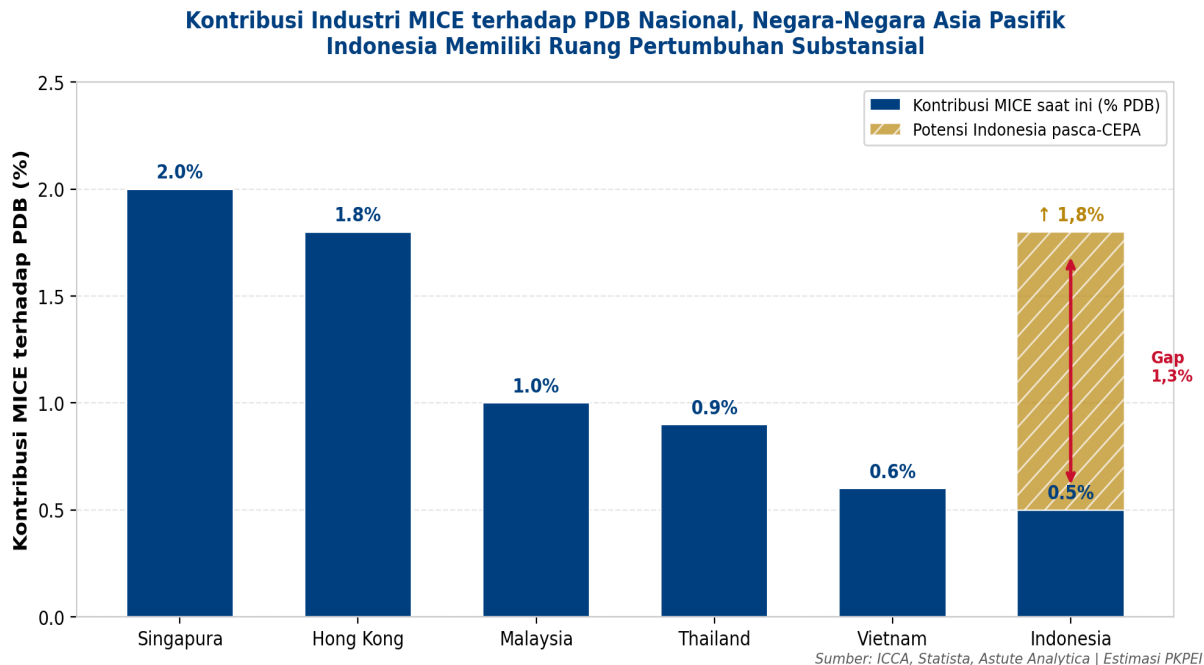
3.3 Gap Struktural dan Ruang Pertumbuhan

Salah satu indikator paling kuat mengenai potensi pertumbuhan industri MICE Indonesia adalah perbandingan kontribusinya terhadap PDB nasional dengan negara-negara kawasan. Data menunjukkan



PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

industri MICE Indonesia menyumbang sekitar 0,5 persen PDB, jauh di bawah Singapura (2,0%), Hong Kong (1,8%), dan bahkan Malaysia (1,0%).



Gambar 3.2 — Kontribusi industri MICE terhadap PDB nasional, perbandingan negara-negara Asia Pasifik 2025. Garis emas menunjukkan potensi Indonesia pasca-CEPA.

Gap sebesar 1,3 persen poin terhadap Singapura dapat dianggap sebagai ruang pertumbuhan substansial yang menanti diisi. Dengan PDB Indonesia tahun 2025 sebesar sekitar US\$ 1,54 triliun, setiap kenaikan 0,1 persen kontribusi MICE setara dengan tambahan ekonomi US\$ 1,54 miliar. Apabila Indonesia berhasil mencapai paritas dengan Singapura, kontribusi sektor ini dapat mencapai US\$ 30 miliar per tahun.

4. Jendela Peluang dan Pemetaan Risiko

4.1 Karakter Sementara Keunggulan Nilai Tukar

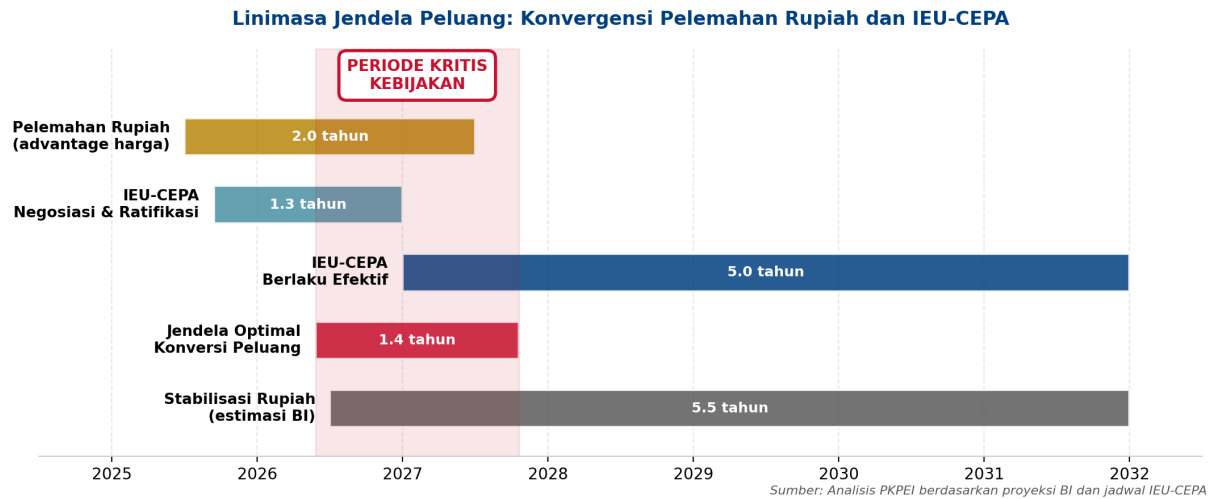
Pertanyaan kritis yang harus dijawab dalam formulasi kebijakan adalah berapa lama keunggulan nilai tukar saat ini akan bertahan. Pernyataan Bank Indonesia pasca Rapat Dewan Gubernur 19–20 Mei 2026 memberikan indikasi yang jelas mengenai trajektori kebijakan moneter ke depan. BI menaikkan suku bunga acuan ke 5,25 persen dan secara eksplisit menyatakan ekspektasi stabilisasi rupiah pada pertengahan tahun, seiring meredanya tekanan musiman dari pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen.

Berdasarkan trajektori kebijakan ini, jendela peluang yang dibuka oleh konvergensi pelemahan rupiah dan IEU-CEPA diperkirakan hanya berdurasi 12 hingga 18 bulan, terhitung sejak pertengahan 2026 hingga akhir 2027. Periode ini secara strategis sangat krusial karena bertepatan dengan tahun pertama



PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

implementasi efektif IEU-CEPA, di mana perhatian korporasi Eropa terhadap Indonesia akan berada pada titik puncaknya.



Gambar 4.1 — Linimasa konvergensi pelemahan rupiah dan IEU-CEPA. Periode kritis kebijakan ditandai dengan area merah muda.

4.2 Pemetaan Risiko Struktural

Kegagalan mengonversi jendela peluang ini menjadi pesanan konferensi internasional yang terjadwal dan kontrak incentive travel korporasi akan menyebabkan kerugian struktural yang sulit diperbaiki. PKPEI mengidentifikasi tiga kategori risiko utama yang perlu menjadi pertimbangan utama dalam formulasi kebijakan.

Tabel 4.1 — Matriks Risiko Struktural Kelambanan Kebijakan

Kategori Risiko	Mekanisme	Magnitudo
Risiko Kontrak	Singapura, Thailand, dan Vietnam menandatangani kontrak penyelenggaraan konferensi tahunan dari korporasi Eropa untuk 3-5 tahun ke depan. Pasar MICE bergerak dalam siklus penawaran (bidding) jangka panjang.	Tinggi
Risiko Persepsi	Persepsi pasar yang terbentuk pada periode 2026-2028 menjadi citra jangka panjang. Indonesia berisiko terjebak dalam segmen menengah-bawah, bukan destinasi premium.	Sedang-Tinggi
Risiko Devisa	Kebocoran devisa dari pelaku bisnis Indonesia yang menyelenggarakan acara korporasi di luar negeri terus berlanjut. Justru saat cadangan devisa nasional sedang tertekan (turun ~US\$ 10 miliar di 2026).	Tinggi



PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

TEMUAN KUNCI

Pasar wisata bisnis bergerak dalam logika ekonomi yang berbeda dari pariwisata rekreasi. Konferensi internasional besar dikontrak 3 hingga 5 tahun sebelum pelaksanaan, dengan komitmen multi-tahun dari penyelenggara. Sekali kontrak ditandatangani dengan destinasi pesaing, sulit bagi Indonesia merebutnya kembali tanpa intervensi struktural yang signifikan.

5. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis empiris dan pemetaan risiko yang telah disajikan, PKPEI merumuskan lima rekomendasi kebijakan strategis yang dapat segera diambil oleh pemerintah Republik Indonesia untuk memaksimalkan dividen dari konvergensi pelemahan rupiah dan IEU-CEPA. Rekomendasi ini disusun dengan mempertimbangkan urgensi temporal jendela peluang serta kapasitas implementasi kelembagaan yang tersedia.

5.1 Pembentukan Gugus Tugas Lintas-Kementerian

Rekomendasi pertama dan paling mendesak adalah pembentukan gugus tugas lintas-kementerian yang menyatukan Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Gugus tugas ini sebaiknya berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan mandat khusus mengonversi keunggulan nilai tukar dan IEU-CEPA menjadi pesanan konferensi internasional yang terjadwal dalam periode 2026–2028.

Pengalaman institusional Singapura melalui Singapore Tourism Board dan Business Events in Singapore programme dapat dijadikan benchmark, dengan adaptasi terhadap konteks kelembagaan Indonesia. Gugus tugas ini perlu dilengkapi dengan kewenangan fiskal khusus untuk memberikan insentif kepada penyelenggara konferensi internasional yang membawa peserta dari Eropa.

5.2 Integrasi Promosi MICE dengan Substansi IEU-CEPA

Indonesia perlu secara aktif mengajukan diri sebagai tuan rumah konferensi internasional yang relevan dengan substansi IEU-CEPA. Sektor-sektor yang dicakup perjanjian, seperti energi terbarukan, sustainable palm oil, hilirisasi mineral kritis, transisi hijau, dan perdagangan jasa, memiliki potensi besar untuk menjadi tema konferensi global yang berlangsung di Indonesia. Pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan biennial conference series yang menempatkan Indonesia sebagai forum regional untuk isu-isu tersebut.

5.3 Insentif Fiskal untuk Penyelenggara Acara Korporasi

Pemberian insentif fiskal khusus bagi korporasi Eropa yang menyelenggarakan incentive travel atau pelatihan internal di Indonesia perlu dipertimbangkan. Model yang dapat diadaptasi adalah skema



PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

Business Events in Singapore yang memberikan pengembalian biaya (rebate) hingga 50 persen biaya venue untuk korporasi internasional yang membawa peserta dalam jumlah tertentu. Insentif serupa di Indonesia dapat dibatasi pada periode 2026–2028 sebagai instrumen percepatan, dengan evaluasi berkala atas efektivitasnya.

5.4 Pengembangan Paket Bleisure

Pengembangan paket terintegrasi yang memadukan komponen bisnis dengan rekreasi (bleisure package) perlu menjadi prioritas pemasaran nasional. Paket ini dapat mengintegrasikan konferensi di Jakarta sebagai pusat kegiatan bisnis dengan kunjungan rekreatif ke destinasi prioritas seperti Bali, Yogyakarta, atau Labuan Bajo. Riset pasar menunjukkan bahwa wisatawan bisnis Eropa cenderung memperpanjang masa tinggal 3 hingga 5 hari untuk rekreasi apabila tersedia kemudahan logistik dan informasi yang komprehensif.

5.5 Penguatan Diplomasi Ekonomi Daerah

Strategi pengembangan wisata bisnis tidak boleh terkonsentrasi hanya di Jakarta dan Bali. Diversifikasi destinasi melalui penguatan kapasitas Sepuluh Destinasi Pariwisata Prioritas, termasuk Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang, menjadi kunci untuk menampung pertumbuhan permintaan jangka panjang. Pemerintah daerah perlu didorong untuk mengembangkan keunggulan tematik masing-masing, misalnya Medan sebagai pusat konferensi sustainable palm oil atau Sulawesi sebagai forum critical minerals.

Tabel 5.1 — Linimasa Implementasi Rekomendasi Kebijakan

No.	Rekomendasi	Aktor Utama	Periode
5.1	Pembentukan gugus tugas lintas-kementerian	Kemenko Perekonomian	Q3 2026
5.2	Integrasi promosi MICE dengan agenda IEU-CEPA	Kemenpar & Kemendag	Q4 2026
5.3	Skema insentif fiskal korporasi	Kemenkeu & Kemenpar	Q1 2027
5.4	Pengembangan paket bleisure terintegrasi	Kemenpar & swasta	Q2 2027
5.5	Penguatan diplomasi ekonomi daerah	Pemda & Kemenpar	Berkelanjutan

6. Penutup

Sejarah ekonomi mencatat bahwa pusat-pusat bisnis kawasan tidak ditentukan oleh ukuran negara atau kekayaan sumber daya alamnya, melainkan oleh kecepatan dan ketepatan keputusan strategis pada momen-momen pivotal. Singapura memilih jalannya pada akhir 1960-an, ketika di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew menjadikan stabilitas, keterbukaan, dan layanan finansial sebagai pilar identitas ekonominya. Dubai mengambil keputusan serupa pada awal 2000-an, menjadikan dirinya hub regional



PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

ekonomi Timur Tengah. Korea Selatan dan Taiwan masing-masing menemukan jalannya melalui pilihan strategis pada momen yang tepat.

Indonesia hari ini menghadapi pilihan yang serupa, meski dalam konteks yang berbeda. Pelemahan rupiah dan IEU-CEPA adalah dua kekuatan yang sedang bertemu dalam konstelasi ekonomi nasional dan global, dan pertemuan itu tidak akan berlangsung lama. Kajian PKPEI ini berargumen bahwa konvergensi tersebut menciptakan jendela peluang struktural berdurasi 12 hingga 18 bulan, sebuah periode yang relatif singkat dalam dimensi kebijakan publik, namun cukup untuk meletakkan fondasi reposisi Indonesia sebagai pusat bisnis baru di Asia.

Keputusan untuk merebut peluang ini atau membiarkannya berlalu akan menentukan posisi Indonesia di peta ekonomi kawasan untuk satu dekade ke depan. Kelambanan dalam merespons konvergensi ini bukan sekadar hilangnya peluang yang dapat direbut di masa depan, melainkan terbentuknya kerugian struktural yang sulit dipulihkan. Kontrak konferensi internasional yang tidak terambil akan beralih ke pesaing untuk siklus tiga hingga lima tahun ke depan. Persepsi pasar yang gagal terbentuk pada periode emas ini akan membatasi ruang manuver di masa mendatang.

Pertanyaannya pada akhirnya bukan lagi apakah peluang ini ada, melainkan apakah Indonesia memiliki kesiapan kelembagaan dan kemauan politis untuk meraihnya sebelum jendela tersebut menutup.

Jakarta, 22 Mei 2026

Pusat Kajian Pariwisata & Ekonomi Indonesia

Center for Indonesian Economic & Tourism Studies



Muhammad Rahmad

Direktur Eksekutif

Hp. 081282050404

Membangun Pengetahuan, Memajukan Kebijakan, Memperkuat Indonesia.

Tentang PKPEI

PKPEI — Pusat Kajian Pariwisata & Ekonomi Indonesia — adalah lembaga kajian independen yang berfokus pada keterkaitan antara industri pariwisata dengan kebijakan ekonomi nasional. Riset PKPEI mencakup ekonomi pariwisata, daya saing destinasi, wisata bisnis dan MICE, diplomasi ekonomi yang melibatkan sektor pariwisata, serta reposisi Indonesia dalam arsitektur pariwisata global.



PUSAT KAJIAN PARIWISATA & EKONOMI INDONESIA

Policy Brief ini disusun berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, European Commission, serta riset pasar dari lembaga-lembaga terpercaya seperti Astute Analytica, International Congress and Convention Association, dan European Travel Commission. Kunjungi PKPEI di <https://pusatkajianpariwisata.id>

Daftar Pustaka dan Sumber Data

- Badan Pusat Statistik (2026). Statistik Indonesia 2026. Jakarta: BPS. Tabel 9.2, 9.3, 9.4 mengenai kunjungan dan pengeluaran wisatawan mancanegara.
- Bank Indonesia (2026). Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR). Data harian Januari 2024 – Mei 2026.
- European Commission (2025). Indonesia-EU Comprehensive Economic Partnership Agreement: Text of Agreement. Brussels.
- Khan, H., Toh, R.S., & Chua, L. (2005). Tourism and Trade: Cointegration and Granger Causality Tests. *Journal of Travel Research*, 44(2), 171-180.
- Rodrik, D. (2008). The Real Exchange Rate and Economic Growth. *Brookings Papers on Economic Activity*, 39(2), 365-412.
- Surugiu, C., & Surugiu, M.R. (2013). Is the Tourism Sector Supportive of Economic Growth? Empirical Evidence on Romanian Tourism. *Tourism Economics*, 19(1), 115-132.
- Astute Analytica (2024). Indonesia MICE Market Forecast to 2032. Industry Report.
- European Travel Commission (2024). EU Business Travel to ASEAN: Post-FTA Impact Assessment. Brussels.

Disclaimer: Policy Brief ini merupakan karya analitis PKPEI yang ditujukan untuk pengayaan diskursus kebijakan publik. Pandangan yang disampaikan adalah pandangan akademis PKPEI dan tidak mencerminkan posisi resmi pemerintah Republik Indonesia atau lembaga lain. Seluruh data statistik bersumber dari publikasi resmi yang dapat diverifikasi.